

**MANAJEMEN PARIWISATA OLEH DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PEKALONGAN
(Studi Pada Objek Wisata Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan)**

Ida Hayu Dwimawanti, Alif Fajar Sidiq

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Pekalongan Regency has a complete tourism potential, starting from the potential of nature tourism, cultural tourism, shopping tourism, and religious tourism, which can provide benefits to the region and the community if managed properly. However, in reality, tourism in Pekalongan Regency has not been able to compete, tourist arrivals are low so that in 2018 Pekalongan Regency placed 24th out of 35 regencies / cities in Central Java based on the number of tourist visits. This study aims to explain how tourism management is carried out by the Department of Youth, Sports and Tourism of Pekalongan Regency and its inhibiting and driving factors. Research analysis based on Tourism Destination Management theory includes planning, organizing, implementing programs, and monitoring. This research uses qualitative methods by collecting data through interviews, observation, documentation, and literature study. The results showed that tourism management was not optimal because there were various problems, namely lack of understanding of the organization's vision, limited budget, lack of numbers and competence of human resources, lack of attractions and attractions, tourism promotion was not optimal and supervision was not comprehensive. Driving factor is the large tourism potential and the support of the central and provincial governments. Other inhibiting factors are lack of community role, rob, unsterile tourism object from community activities, illegal parking, and lack of investors. Researchers recommend collaboration with third parties, add attractions and tourist attraction facilities, explore new tourism potential, follow tourism trends, create digital TIC, improve employee competency, recruit social media admins, create promotion innovations, comprehensive supervision, regulate illegal parking, and collect data and arrangement of traders in tourist attractions.

Key Word: *Tourism, Tourism Management and Tourism Tourism Problems*

PENDAHULUAN

Pariwisata di era sekarang tidak hanya dimaknai sekedar jalan-jalan semata, tetapi lebih dari itu sektor pariwisata dalam suatu negara dapat menyumbang pendapatan negara (devisa) yang cukup besar, serta secara signifikan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja,

pengembangan usaha, serta pemerataan pembangunan spasial dan pada akhirnya akan mendorong perkembangan ekonomi. Indonesia merupakan sebuah negara dengan keindahan alam yang menakjubkan, keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya dengan berbagai kearifan lokal dan keunikan masing-masing daerah yang tentunya akan menciptakan potensi destinasi wisata yang luar biasa jika dimanfaatkan dengan baik.

Manajemen Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan. Pengembangan Pariwisata masuk ke dalam 10 (sepuluh) program prioritas nasional yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, ini menandakan bahwa pemerintah sangat serius dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata Indonesia untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

Kabupaten Pekalongan merupakan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi pariwisata yang melimpah mulai dari

Wisata Alam, Ekowisata, Wisata Buatan, Wisata Budaya, Wisata Belanja, dan Wisata Religi. Namun, adanya potensi pariwisata yang besar ini harus dibarengi dengan manajemen pariwisata yang baik sehingga potensi tersebut bisa tergali secara maksimal dan dapat memberikan dampak yang maksimal pula.

Berdasarkan observasi awal terdapat indikasi permasalahan pada manajemen destinasi pariwisata di Kabupaten Pekalongan yaitu daya saing obyek wisata daerah masih rendah; belum optimalnya pengembangan potensi event dan kegiatan wisata berbasis wilayah; kurangnya promosi wisata Kabupaten Pekalongan secara nasional; masih rendahnya kualitas SDM pelaku wisata; infrastruktur dan sarana prasarana belum lengkap dan kondisinya kurang baik; dan belum optimalnya kerjasama para pemangku kepentingan serta daerah wisata yang rawan bencana. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana manajemen pariwisata yang

dilakukan oleh Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, khususnya pada objek wisata yang merupakan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pariwisata yang dilakukan oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan, permasalahan serta faktor pendorong dan penghambatnya.

Landasan Teori

Administrasi Publik

Administrasi publik adalah ilmu, seni, dan proses tentang segala kegiatan/ aktivitas yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif di dalam kehidupan pemerintahan dalam upayanya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat (publik). Aktivitas-aktivitas yang dimaksud adalah kerjasama mengelola sumber daya sebuah organisasi publik baik sumber daya manusia maupun sumber daya barang yang ada mulai dari proses perencanaan (formulasi kebijakan) sampai dengan pelaksanaannya

(implementasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Manajemen Publik

Manajemen publik bisa diartikan juga sebagai suatu ilmu, aktivitas/kegiatan atau proses kerjasama dua orang atau sekelompok orang di dalam lingkup administrasi/pemerintahan (instansi publik) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan, yaitu pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya manajemen publik penuh dengan aturan dan formalitas beda dengan manajemen privat. fungsi-fungsi manajemen dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa fungsi yang memiliki makna sama, yaitu tercermin pada fungsi-fungsi *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*. Sedangkan fungsi-fungsi yang lain merupakan cara penyebutan yang berbeda

Manajemen Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, definisi wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Janianton Damanik dan Frans Teguh (2013 : 25) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Destinasi Pariwisata Sebuah Pengantar Ringkas, manajemen destinasi pariwisata dapat dilakukan dengan berpatok kepada 4 (unsur) yaitu: **1) Perencanaan; 2) Pengorganisasian; 3) Implementasi Program; serta Monitoring dan Evaluasi.**

Menurut Oka A. Yoeti dalam Jurnal berjudul Pengelolaan Pariwisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat (2017: 5) berpendapat bahwa berhasilnya suatu pengelolaan objek wisata, hingga tercapainya kawasan pariwisata dan menjadi industri pariwisata sangat tergantung pada 3A yaitu Atraksi

(*attraction*); Aksesibilitas (*accessibility*); dan Fasilitas (*amenities*).

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Situs penelitian ini adalah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan dan informan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara adalah kepada Kabid Pariwisata, Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, Kepala UPTD Pengelola Objek Wisata dan Staf UPTD Pengelola Objek Wisata serta para Wisatawan.

Jenis data yang digunakan yaitu data yang berbentuk teks dan data yang berbentuk kata-kata.

Sumber data primer berasal dari wawancara dengan informan dan observasi langsung ke lapangan. Data sekunder berasal dari dokumen, buku, data statistik dan peraturan Perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi terus terang dan tersamar, karena peneliti langsung melakukan

pengamatan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, peneliti juga berharap akan mendapatkan data yang bersifat rahasia melalui teknik observasi tersamar.

Data yang diperoleh dari informan selanjutnya akan dianalisis secara sistematis dengan melakukan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan teknik triangulasi yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

Manajemen Pariwisata Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan

1) Perencanaan

Dinporapar Kabupaten Pekalongan sudah memiliki visi yang jelas yaitu *“Mewujudkan Pemuda Dan Olahraga Unggul dan Berprestasi Optimal Serta*

Mewujudkan Pariwisata Andalan Demi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan”. Namun, pegawai Dinporapar belum memahami visi yang ada.

Dinporapar Kabupaten Pekalongan telah menetapkan 3 (tiga) program utama yaitu program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan kemitraan. Perumusan program manajemen pariwisata dilakukan oleh tim di Bappeda, Peran dari Dinporapar adalah mengusulkan program yang akan diajukan ke Bappeda.

Faktor penghambat yaitu Anggaran terbatas; Jumlah dan kompetensi pegawai minim; tidak sterilnya area objek wisata; kurangnya peran dan kesadaran masyarakat; rob merusak fasilitas objek wisata; parkir liar di area objek wisata; Jumlah dan kondisi fasilitas objek wisata kurang memadai; Kurangnya investor. Faktor pendorong Sumber daya alam sangat potensial untuk pengembangan pariwisata; dukungan dari Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat; ketersediaan lahan daerah masih luas dan masih banyak potensi sumber daya alam yang belum tergarap memungkinkan untuk memunculkan destinasi wisata baru.

Ada 3 (tiga) strategi manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan yaitu optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi pariwisata; Peningkatan sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata dan Peningkatan pengembangan kemitraan pariwisata melalui Pokdarwis. Lebih spesifik strategi yang akan dilakukan pada tahun 2019 adalah menambah spot-spot daya tarik baru di destinasi pariwisata yang merupakan kepemilikan dan dikelola langsung oleh Pemda.

Dinporapar Kabupaten Pekalongan telah melakukan pendaftaran, pencatatan dan pendataan usaha-usaha pariwisata yang ada, namun pendataan yang dilakukan hanya sebatas data objek-objek wisata yang ada, untuk pedagang maupun usaha-usaha

disekitar objek wisata belum dilakukan pendataan.

Anggaran pariwisata belum cukup untuk pengembangan pariwisata. Tahun 2019, anggaran pariwisata sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan. Target pendapatan sektor pariwisata tahun 2019 sebesar Rp 1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan tahun 2020 naik menjadi Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Sumber dana lain selain APBD adalah DAK dan dana hibah dari Pemprov Jawa Tengah.

Pengawasan belum direncanakan dengan baik, belum ada rencana pengawasan yang jelas langkah-langkah dan sistem penilaiannya. Pengawasan objek wisata yang dilakukan oleh Dinporapar adalah dengan mengunjungi langsung objek wisata. Monitoring objek wisata dilakukan terus menerus tetapi tidak ada jadwal rutin dan pasti, evaluasi sebagai upaya pengendalian kerja pegawai juga dilakukan apabila target

pendapatan objek wisata perbulan tidak tercapai. Aspek yang menjadi fokus pengawasan adalah pada

2) Pengorganisasian

Pegawai yang berstatus ASN direkrut sesuai standar dan mekanisme yang telah diatur oleh Negara. Apabila membutuhkan tenaga kerja (*outsourcing*) Dinporapar Kabupaten Pekalongan akan mengadakan lelang/tender yang akan diikuti oleh perusahaan penyedia tenaga kerja *outsourcing*, perusahaan yang memenangkan tender harus menyediakan tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan. Namun, dalam pelaksanaannya sekarang, mekanisme perekrutan tenaga *outsourcing* langsung oleh pengelola objek wisata tanpa melalui proses seleksi yang jelas, terukur dan ketat, perekrutan dilakukan dengan mencari tenaga kerja *outsourcing* yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata.

Pada struktur organisasi Dinporapar Kabupaten Pekalongan, yang bertanggungjawab melakukan manajemen pariwisata yaitu Bidang

pencapaian target pendapatan objek wisata.

Pariwisata yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata serta penyuluhan dan pemasaran wisata, kemudian Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Pengelola Objek Wisata merupakan bagian dari Dinporapar Kabupaten Pekalongan yang memiliki tugas sebagai pengelola lapangan objek wisata milik Pemda, diantaranya adalah Objek Wisata Linggo Asri, Bumi Perkemahan dan Pantai Depok.

Mekanisme penempatan pegawai pengelola objek wisata belum dilakukan dengan baik secara merata. Akibat keterbatasan pegawai, spesialisasi kerja hanya dilakukan di OW Linggo Asri. Pegawai yang tidak memiliki spesialisasi kerja dituntut memiliki beban tugas ganda. Alur koordinasi dan wewenang di Dinporapar Kabupaten Pekalongan dilakukan sesuai standar birokrasi yaitu berjenjang. Proses pendelegasian wewenang dilakukan sesuai dengan tingkatan jabatan yang tertera pada struktur organisasi

Dinporapar Kabupaten Pekalongan, yaitu dari tingkat jabatan tinggi ke jabatan yang ada di bawahnya.

3) Implementasi Program

Daya tarik yang ada di objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih belum bisa untuk menarik kunjungan wisatawan secara signifikan. Perlu adanya penambahan dan peningkatan atraksi wisata supaya lebih lengkap dan variatif, atraksi wisata yang ada sekarang bisa dibidang tertinggal jika dibandingkan dengan yang ada di daerah lain. Ketiga objek wisata yang dikelola oleh Pemkab antara lain Objek Wisata Linggo Asri, Objek Wisata Bumi Perkemahan dan Objek Wisata Pantai Depok belum bisa memenuhi tiga unsur daya tarik wisata yaitu ada yang dilihat; ada yang dilakukan (aktifitas) dan ada yang bisa dibeli atau dibawa pulang. Program yang diusulkan untuk tahun 2020 antara lain adalah re konsep Objek Wisata Linggo Asri menjadi objek wisata dengan konsep Taman Wisata kemudian akan ditambah fasilitas atraksi dan kuliner. Re konsep juga akan dilakukan pada

Objek Wisata Bumi Perkemahan menjadi berkonsep Wana Wisata dengan penambahan atraksi *Glamour Camping*, kuliner, kopi, dan wahana *adventure* seperti panahan dan *shooting target*. Sedangkan untuk Objek Wisata Pantai Depok masih belum ada rencana untuk menambah atraksi wisata karena berbagai masalah di dalam pengelolannya.

Masih terdapat beberapa fasilitas objek wisata yang belum tersedia di ketiga objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sedangkan, beberapa fasilitas objek wisata yang sudah tersedia kondisinya kurang terawat dan perlu perbaikan. Objek Wisata Linggo Asri kurang beberapa fasilitas yang belum tersedia ataupun jumlahnya yang kurang mencukupi, yaitu fasilitas tempat parkir dan petugas parkir, kemudian fasilitas restoran dan rumah makan yang jumlahnya masih minim dan belum tertata, tempat sampah dan gazebo untuk tempat berteduh serta fasilitas yang kurang terawat yaitu kandang hewan dan toilet. Fasilitas yang belum dimiliki OW Bumi Perkemahan adalah lahan parkir dan

petugas parkir serta tempat berteduh. Fasilitas yang belum tersedia di OW Pantai Depok antara lain tempat parkir dan petugas parkir, rambu-rambu pembatas, penjaga pantai/petugas keselamatan, mushola, dan tempat. Toilet dan tempat untuk mengganti pakaian pun sangat minim serta kondisinya yang kurang terawat, begitupun beberapa fasilitas bermain yang kondisinya sudah kusam dan kurang terawat

Tourism Information Center (TIC) berfungsi sebagai penyedia berbagai informasi wisata yang ada di suatu daerah kepada wisatawan. Kabupaten Pekalongan memiliki dua TIC yang terletak di Kecamatan Doro dan kecamatan Petungkriyono, namun TIC tersebut sekarang dinonaktifkan karena dianggap tidak efektif.

Jumlah hotel atau penginapan di Kabupaten Pekalongan masih minim dan kondisinya kurang baik sehingga kurang mendukung untuk pengembangan pariwisata daerah. Kabupaten Pekalongan hanya terdapat satu hotel dengan spesifikasi

bintang tiga dan hanya ada tujuh unit hotel non bintang yang terdaftar.

Akses menuju objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan mudah dijangkau dan sudah tersedia jalan aspal yang lebar dengan kondisi yang baik serta lalu lintas yang lancar. Sudah tersedia sarana angkutan umum untuk menuju ke objek wisata. Namun, masih ada beberapa kendala pada angkutan umum yang ada yaitu jadwal keberangkatan yang tidak pasti/tetap dan angkutan umum yang tidak bisa mengantarkan hingga ke titik lokasi objek wisata.

Diklat yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai dilakukan sekali setahun, bahkan terkadang tidak ada sama sekali dalam setahun, jumlah ini tentu sangat minim. pengelola objek wisata di Kabupaten Pekalongan sangat sedikit yang sudah memiliki sertifikat atau yang sudah mengikuti sertifikasi sebagai pengelola objek wisata. terhitung hanya ada 2 (dua) orang yang sudah mengikuti sertifikasi yaitu dari pengelola Objek

Wisata Bumi Perkemahan. Pengadaan pendidikan sadar wisata bagi masyarakat di Kabupaten Pekalongan sangat minim. Pengadaan Diklat, sertifikasi dan pendidikan sadar wisata terkendala anggaran yang terbatas.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum membentuk atau belum memiliki badan-badan otoritas tertentu dibidang pariwisata seperti Badan Promosi Pariwisata atau Badan Otoritas Pengelola Objek Wisata seperti yang terdapat di daerah lain atau pemerintah pusat. Dinporapar Kabupaten Pekalongan telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang jelas. SDM pengelola objek wisata di Kabupaten Pekalongan masih memerlukan pengembangan kompetensi. SDM yang ada belum memiliki *mindset* untuk melakukan pengembangan pariwisata secara maksimal, mereka juga minim inovasi. Jejaring yang dimiliki oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan masih belum maksimal, kerjasama Dinporapar Kabupaten Pekalongan dengan *stakeholder* pariwisata lain belum terjalin dengan

baik belum ada kerjasama yang dilakukan oleh Dinporapar dengan pihak swasta untuk mengembangkan pariwisata daerah karena iklim investasi yang belum menarik investor datang.

Kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan yaitu melalui media sosial intagram @wisata_pekalongankab yang dikelola langsung oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan dan *website* resmi Dinporapar pada laman <https://www.dinporapar-pekalongankab.web.id/>. Upaya lain adalah mengadakan event-event daerah yang dapat menarik kunjungan wisatawan sekaligus memunculkan citra pariwisata Kabupaten Pekalongan, Dinporapar juga mengenalkan wisata Kabupaten Pekalongan dengan mengikuti event-event yang diadakan oleh daerah lain. Promosi wisata juga dilakukan oleh duta wisata Kabupaten Pekalongan dan pribadi pegawai pengelola objek wisata melalui media sosial mereka masing-masing. Kendalanya adalah belum adanya admin media sosial sehingga promosi kurang *update* dan

minimnya event pariwisata Kabupaten Pekalongan.

4) Pengawasan

Kontrol yang dilakukan oleh Dinporapar Kabupaten Pekalongan adalah dengan mendatangi langsung objek wisata yang dikelola Pemda untuk mengawasi manajemen objek wisata yang dilakukan oleh pegawai pengelola. Kegiatan ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan pengelola apakah ada hambatan yang dihadapi di dalam proses manajemen objek wisata. Sayangnya, kontrol ini belum memiliki jadwal yang pasti dan hanya dilakukan ketika pegawai Dinporapar memiliki waktu luang untuk menuju ke objek wisata. Kemudian, untuk kontrol terhadap aktifitas dan fasilitas objek wisata dilakukan oleh UPTD Pengelola Objek Wisata mulai monitoring kebersihan, monitoring fasilitas, dan monitoring pengunjung menjadi tanggungjawab dari pegawai UPTD. Monitoring oleh UPTD masih berjalan kurang maksimal, dibuktikan dengan objek wisata yang masih terdapat banyak sampah berserakan kemudian pengawasan pengunjung

yang kurang ketat sehingga masih terjadi vandalisme fasilitas objek wisata yang dilakukan oleh pengunjung dan pengunjung yang bermain fasilitas objek wisata tanpa sepengetahuan petugas objek wisata, hal ini dikarenakan minimnya jumlah personil petugas objek wisata.

Dinporapar Kabupaten Pekalongan telah melakukan identifikasi hambatan manajemen pariwisata yang dihadapi, Faktor penghambat yaitu Anggaran terbatas; Jumlah dan kompetensi pegawai minim; tidak sterilnya area objek wisata; kurangnya peran dan kesadaran masyarakat; rob merusak fasilitas objek wisata; parkir liar di area objek wisata; Jumlah dan kondisi fasilitas objek wisata kurang memadai; Kurangnya investor.

Evaluasi dilakukan pada akhir tahun, proses evaluasi dilakukan bersama Bappeda dan Inspektorat dan hal-hal yang di evaluasi adalah implementasi program, anggaran, kendala yang dihadapi, dan pencapaian target organisasi. Evaluasi juga bisa dilakukan setiap bulan apabila target pendapatan wisata perbulan tidak tercapai.

Setelah melakukan evaluasi, langkah selanjutnya adalah menentukan solusi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Solusi atas hambatan manajemen pariwisata, yang telah ditentukan kemudian diusulkan dan apabila disetujui kemudian dimasukkan ke dalam perencanaan program untuk diimplementasikan pada tahun berikutnya.

Kesimpulan

Manajemen pariwisata di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) masih belum optimal, masih ditemukan kendala maupun permasalahan pada setiap tahapannya. Permasalahan pada tahap perencanaan yaitu pegawai tidak memahami visi, pendataan usaha pariwisata minim, anggaran terbatas, dan belum ada mekanisme pengendalian (*monitoring*) kegiatan yang jelas. Pada tahapan pengorganisasian terdapat beberapa permasalahan antara lain mekanisme perekrutan pegawai *outsourcing* yang tidak jelas dan asal-asalan, tidak

Berdasarkan hasil penelitian belum ada prestasi yang signifikan dari manajemen destinasi pariwisata di Kabupaten Pekalongan, hanya pada tahun 2019 kenaikan kunjungan wisatawan cukup besar karena adanya penambahan daya tarik wisata baru di salah satu objek wisata.

ada spesialisasi kerja, serta alur koordinasi berjenjang membuat proses koordinasi kurang efektif. Permasalahan dalam tahapan implementasi program antara lain, daya tarik destinasi wisata belum menarik kunjungan wisatawan, jumlah dan kondisi fasilitas wisata kurang memadai, TIC kurang efektif, jumlah dan kualitas akomodasi kurang memadai, angkutan umum belum memiliki jadwal keberangkatan yang pasti, kompetensi pegawai minim, penyelenggaraan Diklat, sertifikasi dan pendidikan sadar wisata minim, belum ada kerjasama dengan pihak swasta dan promosi wisata belum maksimal. Pada tahapan pengawasan, beberapa permasalahan pada tahapan

pengawasan antara lain, pengawasan yang dilakukan hanya sebatas kontrol terhadap pendapatan, kemudian pengawasan terkendala jumlah

pegawai yang terbatas, serta belum ada pencapaian/prestasi sektor pariwisata yang membanggakan.